



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Agustus 2020/Khusus - Calon PN)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)  
**UNIT KERJA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**SUB UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **RUSDY MASTURA**
2. Jabatan : **CALON GUBERNUR**
3. NHK : **752320**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 4.433.795.600**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/169 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/154 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Bangunan Seluas 58 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.553.668.500
5. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 14.700.000
6. Tanah Seluas 11500 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
7. Tanah Seluas 1602 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 22.428.000
8. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
9. Tanah Seluas 3129 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 62.580.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 455 m2/390 m2 di KAB / KOTA BANGGAI, HASIL SENDIRI Rp. 152.625.000



11. Tanah Seluas 1014 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 7.250.100

12. Tanah Seluas 1678 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 80.544.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 1.200.000.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS ODYSSEY, 2.4 S CVT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

3. MOBIL, TOYOTA CAMRY 2.5G Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

4. MOBIL, MINI COOPER COOP 1.6 CONTRYMAN AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 446.900.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 272.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 6.352.695.600

**III. HUTANG** Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 6.352.695.600

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **1 September 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Agustus 2020/Khusus - Calon PN)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)  
**UNIT KERJA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**SUB UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MA'MUN AMIR
2. Jabatan : CALON WAKIL GUBERNUR
3. NHK : 87078

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.600.000.000</b>
1. Tanah Seluas 650 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 4.950.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>48.000.000</b>
1. MOBIL, HYUNDAI SANTA FE MINIBUS Tahun 2001, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 48.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>480.610.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>213.966.494</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.342.576.494</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.342.576.494</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 September 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MULYONO
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 59845

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 628.278.000

1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 105.200.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 112.078.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , LAINNYA Rp. 385.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 396.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.0 AT MINI BUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 136.000.000
3. MOBIL, AVANSA VELOZ MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 246.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 214.800.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 650.858.587



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.890.436.587
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.890.436.587

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.